

Interlocking Poverty Trap di Kabupaten Sampang: Kajian Struktural, Kultural, dan Geografis dalam Perspektif Ekonomi Islam

Annisa

Universitas Islam Negeri Madura
Email: annisa.b3032@gmail.com

Ali Abidin

Universitas Islam Negeri Madura
Email: aliabidinazbi@gmail.com

Ainun Nashih Syahbana

Universitas Islam Negeri Madura
Email: inunk168@gmail.com

Farahdila Kutsiyah

Universitas Islam Negeri Madura
Email: keindahanmaduraku@gmail.com

Abstract

Chronic poverty in Kabupaten Sampang for more than three decades is a multidimensional phenomenon arising from the interaction of structural, cultural, and geographical factors that reinforce one another. This study aims to analyze the pattern of the interlocking poverty trap (multidimensional poverty trap) in Sampang by integrating the Islamic economic approach. The method used is qualitative with a case study approach in three representative poverty areas, namely Sresek, Kedungdung, and Ketapang Laok. The results show that limited access to education, weak economic infrastructure, a fatalistic culture, and the isolation of coastal areas strengthen the intergenerational reproduction of poverty. From the Islamic economic perspective, these conditions indicate the unfulfilled principles of maqāṣid syariah, especially the aspects of hifz al-‘aql (protection of intellect), hifz al-māl (protection of property), and the goal of falah (worldly and hereafter prosperity). Efforts to break the poverty trap need to be directed at strengthening human resources, improving regional connectivity, and empowering sharia-based economy through optimizing zakat, productive waqf, and sharia microfinance institutions. This study emphasizes the

importance of a holistic Islamic value-based approach in designing inclusive, just, and sustainable development policies in underdeveloped regions.

Keywords: Multidimensional Poverty; Interlocking Poverty Trap; Maqāṣid Syariah

Abstrak

Kemiskinan kronis di Kabupaten Sampang selama lebih dari tiga dekade merupakan fenomena multidimensi yang lahir dari interaksi antara faktor struktural, kultural, dan geografis yang saling memperkuat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola *interlocking poverty trap* (perangkap kemiskinan multidimensi) di Sampang dengan mengintegrasikan pendekatan ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di tiga wilayah representatif kemiskinan, yaitu Sresek, Kedungdung, dan Ketapang Laok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan, lemahnya infrastruktur ekonomi, budaya fatalistik, serta keterisolasi wilayah pesisir memperkuat reproduksi kemiskinan antargenerasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya prinsip *maqāṣid syariah*, terutama aspek *hifz al-‘aql* (pemeliharaan akal), *hifz al-māl* (pemeliharaan harta), dan tujuan *falah* (kesejahteraan dunia-akhirat). Upaya pemutusan perangkap kemiskinan perlu diarahkan pada penguatan sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, serta pemberdayaan ekonomi berbasis syariah melalui optimalisasi zakat, wakaf produktif, dan lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik berbasis nilai Islam dalam merancang kebijakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di daerah tertinggal.

Kata kunci: Kemiskinan Multidimensi; *Interlocking Poverty Trap*; *Maqāṣid Syariah*

A. Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi persoalan universal yang tidak hanya menyangkut kekurangan pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan dalam memperoleh layanan dasar, kerentanan sosial, serta hambatan struktural yang menekan mobilitas ekonomi masyarakat.¹ Di Indonesia, kesenjangan kemiskinan antarwilayah tetap menjadi isu mendasar, terutama di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau dan

¹ Dwirani Puspa Artha and Teguh Dartanto, 'The Multidimensional Approach to Poverty Measurement in Indonesia : Measurements , Determinants and Its Policy Implications', 2020.

infrastruktur yang tertinggal.² Salah satu contohnya adalah Kabupaten Sampang di Provinsi Jawa Timur, yang selama lebih dari tiga dekade secara konsisten menempati posisi tertinggi tingkat kemiskinan di provinsi tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, proporsi penduduk miskin di Sampang berkisar antara 20 hingga 24 persen, jauh melampaui rata-rata provinsi sebesar 9,4 persen.³ Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Sampang bersifat kronis dan diwariskan lintas generasi, mencerminkan adanya persoalan struktural yang mendalam.

Dalam kajian ekonomi konvensional, penyebab kemiskinan sering dijelaskan melalui rendahnya pendapatan, terbatasnya akses pasar, serta lemahnya layanan publik.⁴ Namun, kondisi di Sampang memperlihatkan bahwa kemiskinan terbentuk dari kombinasi faktor yang kompleks, mencakup ketimpangan pendidikan dan infrastruktur (faktor struktural), sikap fatalistik serta pola konsumsi tidak produktif (faktor kultural), dan keterpenciran wilayah pesisir yang rentan terhadap gangguan ekologis (faktor geografis). Keterkaitan antarfaktor ini menciptakan apa yang disebut *interlocking poverty trap*, yaitu perangkap kemiskinan multidimensi yang saling memperkuat dan sulit diputus.⁵

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan dipahami tidak semata sebagai persoalan ekonomi, melainkan juga sebagai permasalahan moral dan sosial yang menuntut keadilan distribusi serta pemenuhan hak dasar manusia.⁶ Islam menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kesejahteraan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُونَ ۙ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Adz-Dzariyat: 19)

Ayat ini menegaskan kewajiban sosial untuk menegakkan distribusi kekayaan yang adil. Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya bekerja secara mandiri dan tidak bergantung pada bantuan semata:

“Sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang adalah dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Tirmidzi)

² Munich Personal, Repec Archive, and De Silva, ‘Beyond the Headcount: Examining the Dynamics and Patterns of Multidimensional Poverty in Indonesia.’, 2014.

³ Jimea Jurnal and others, ‘PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TERHADAP ANGKA MORBIDITAS KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)’, 9.1 (2025), 1223–40.

⁴ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (New York: Pearson Education, 2020).

⁵ Christopher B. Barrett dan Brent M. Swallow, “Dynamic Poverty Traps and Rural Livelihoods,” *World Development* 34, no. 1 (2006); Jyotsna Jalan dan Martin Ravallion, “Geographic Poverty Traps? A Micro Model of Consumption Growth in Rural China,” *Journal of Applied Econometrics* 17, no. 4 (2002).

⁶ F. Khaleel, “Redefining Poverty and Its Measurement: An Islamic Political Economy Approach,” *Grieb: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 4, no. 1 (2021): 17–34.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas individu menjadi inti dari strategi pengentasan kemiskinan, bukan sekadar bantuan sesaat yang bersifat konsumtif.⁷ Tujuan pembangunan dalam ekonomi Islam adalah mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui penerapan *maqāṣid syariah*, yang meliputi pemeliharaan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁸

Dalam konteks Sampang, keterbatasan pendidikan menunjukkan lemahnya *hifz al-aql*, ketidakmampuan masyarakat mengelola potensi ekonomi mencerminkan belum optimalnya *hifz al-mal*, sementara ketergantungan terhadap bantuan sosial menandakan belum tercapainya *falah*. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan di Sampang harus dikaji melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya menggunakan kerangka ekonomi konvensional, tetapi juga perspektif ekonomi Islam yang menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan pemberdayaan umat.⁹ Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor penyebab kemiskinan kronis di Kabupaten Sampang yang terbentuk melalui *interlocking poverty trap* serta menilai relevansinya dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Landasan Teori

1. Konsep Kemiskinan dan Interlocking Poverty Trap

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi secara layak. Menurut Todaro dan Smith, kemiskinan di negara berkembang bukan sekadar rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan kemampuan (*lack of capabilities*) yang menghambat partisipasi penuh dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.¹⁰ Sen menegaskan bahwa kemiskinan harus dipahami sebagai *deprivation of basic capabilities*, bukan hanya kekurangan sumber daya material.¹¹

Konsep *interlocking poverty trap* diperkenalkan untuk menjelaskan bagaimana berbagai dimensi kemiskinan saling memperkuat satu sama lain secara sistemik. Menurut Carter dan Barrett, kemiskinan menjadi *trap* ketika kombinasi antara aset rendah, pendidikan terbatas, dan institusi lemah menyebabkan masyarakat tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan meskipun telah menerima bantuan eksternal.¹² Dalam konteks daerah pedesaan dan pesisir seperti Sampang, faktor struktural (akses sumber

⁷ Muslihun, "Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif," *Jurnal Al-Mawarid* 23, no. 2 (2021).

⁸ Muhammad Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (Jeddah: IRTI-IDB, 2008).

⁹ S. Maulida, "Maqasid Shariah Index: A Literature Review," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (2023).

¹⁰ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (New York: Pearson Education, 2020).

¹¹ Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999).

¹² Michael R. Carter dan Christopher B. Barrett, "The Economics of Poverty Traps and Persistent Poverty: An Asset-Based Approach," *Journal of Development Studies* 42, no. 2 (2006).

daya), kultural (norma sosial), dan geografis (isolasi wilayah) sering berinteraksi membentuk mekanisme perangkap kemiskinan yang sulit diputus.¹³

2. Faktor Struktural, Kultural, dan Geografis Kemiskinan

a. Faktor structural,

Mencakup ketimpangan akses terhadap pendidikan, modal, serta kelemahan kelembagaan ekonomi. North menilai bahwa ketidaksetaraan institusional dan lemahnya tata kelola pembangunan lokal menjadi akar dari rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah.¹⁴ Selain itu, Jalan dan Ravallion menunjukkan bahwa isolasi spasial akibat infrastruktur buruk memperburuk kesenjangan pendapatan antarwilayah.¹⁵

b. Faktor kultural,

Menjelaskan bagaimana nilai dan kebiasaan sosial dapat memperkuat kemiskinan. Oscar Lewis mengemukakan konsep *culture of poverty*, yaitu pola perilaku dan orientasi nilai yang diwariskan lintas generasi, menciptakan ketergantungan dan sikap pasrah terhadap nasib.¹⁶ Dalam masyarakat pesisir Madura, hal ini sering muncul dalam bentuk fatalisme religius dan pola konsumsi simbolik, di mana pendapatan digunakan untuk kebutuhan sosial nonproduktif seperti hajatan, bukan investasi usaha.

c. Faktor geografis

Berkaitan dengan keterpenciran wilayah, keterbatasan transportasi, dan kondisi ekologis ekstrem yang menurunkan produktivitas masyarakat. Sachs dan Gallup menjelaskan bahwa *geographic disadvantage* dapat menciptakan kemiskinan yang bersifat struktural melalui biaya logistik tinggi, rendahnya akses pasar, dan kerentanan terhadap bencana alam.¹⁷ Dalam kasus Sampang, karakter pesisir dengan infrastruktur terbatas memperkuat *geographic poverty trap* yang menurunkan efisiensi ekonomi lokal.

Ketiga faktor ini saling berinteraksi, sebagaimana dijelaskan oleh Barrett dan Swallow bahwa *interlocking poverty trap* terjadi ketika hubungan kausal antar dimensi (pendidikan, aset, lokasi, dan nilai budaya) menciptakan siklus kemiskinan yang berulang.¹⁸

3. Perspektif Ekonomi Islam terhadap Kemiskinan

Dalam ekonomi Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai masalah moral dan sosial. Tujuan utama ekonomi Islam

¹³ Sabina Alkire dan Maria Emma Santos, "Multidimensional Poverty Index," *OPHI Working Paper*, Oxford University, 2010.

¹⁴ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

¹⁵ Jyotsna Jalan dan Martin Ravallion, "Geographic Poverty Traps? A Micro Model of Consumption Growth in Rural China," *Journal of Applied Econometrics* 17, no. 4 (2002).

¹⁶ Oscar Lewis, *La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty—San Juan and New York* (New York: Random House, 1966).

¹⁷ Jeffrey D. Sachs dan John Luke Gallup, "Geography and Economic Development," *NBER Working Paper Series* No. 6849 (1998).

¹⁸ Christopher B. Barrett dan Brent M. Swallow, "Dynamic Poverty Traps and Rural Livelihoods," *World Development* 34, no. 1 (2006).

adalah mencapai *falah* (kesejahteraan dunia–akhirat) melalui pemenuhan *maqāsid syariah*: perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁹

Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil sebagaimana firman Allah Swt.:

كَنْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْ كُمْ

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Prinsip ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab menjamin pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Menurut Chapra, pembangunan dalam ekonomi Islam harus mencakup dimensi spiritual dan material secara seimbang agar kemiskinan dapat diberantas tanpa menimbulkan ketimpangan baru.²⁰

Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif berperan penting dalam mengurangi kemiskinan struktural. Ahmed menjelaskan bahwa optimalisasi *Islamic social finance* dapat menghubungkan redistribusi kekayaan dengan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.²¹ Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) terbukti efektif memperkuat modal sosial dan kemandirian masyarakat miskin.²²

Dengan demikian, pendekatan ekonomi Islam terhadap kemiskinan menekankan sinergi antara pemberdayaan individu (*empowerment*), keadilan distribusi (*equity*), dan tanggung jawab sosial kolektif (*social responsibility*). Hal ini berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung fokus pada pertumbuhan dan pendapatan semata.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengkaji fenomena kemiskinan kronis (*interlocking poverty trap*) secara mendalam di Kabupaten Sampang. Pendekatan ini dipilih karena kemiskinan kronis merupakan permasalahan kontekstual yang melibatkan interaksi sosial, struktural, dan geografis yang kompleks di dalam kehidupan nyata masyarakat.²³ Metode studi kasus dipandang tepat untuk memahami fenomena yang terjadi pada situasi nyata, di mana batas antara konteks dan objek penelitian tidak dapat dipisahkan secara tegas.²⁴

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive pada tiga wilayah yang merepresentasikan karakter utama kemiskinan di Sampang: Desa Sregeh (selatan),

¹⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

²⁰ Muhammad Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (Jeddah: IRTI-IDB, 2008).

²¹ Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2004).

²² M. Asutay, “Islamic Moral Economy and the Financialisation Process,” *Islamic Economic Studies* 19, no. 1 (2011).

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9–11.

²⁴ Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018), hlm. 17–20.

Kecamatan Kedungdung (tengah), dan Desa Ketapang Laok (utara). Ketiga wilayah tersebut dipilih karena memiliki persentase kemiskinan tertinggi, tingkat pendidikan rendah, serta akses infrastruktur yang terbatas, sehingga dapat menggambarkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan yang berbeda.²⁵

Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling agar data yang diperoleh kaya informasi dan representatif terhadap fenomena kemiskinan kronis.²⁶ Informan meliputi kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, tenaga pendidik, petani, nelayan, pelaku UMKM, serta keluarga miskin yang telah lama menghadapi keterbatasan ekonomi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam secara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), laporan desa, serta literatur akademik terkait kemiskinan daerah.²⁷

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, melalui tiga tahapan utama: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.²⁸ Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan lokasi, serta dilakukan member checking kepada informan utama untuk memastikan validitas hasil.²⁹

Integrasi perspektif ekonomi Islam dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan prinsip *maqāṣid syariah* dan tujuan pembangunan Islam, yaitu mewujudkan *falah* (kesejahteraan) serta menghilangkan ketimpangan melalui instrumen syariah yang adil dan inklusif.³⁰

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 53–57.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 128–132.

²⁷ John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), hlm. 183–187.

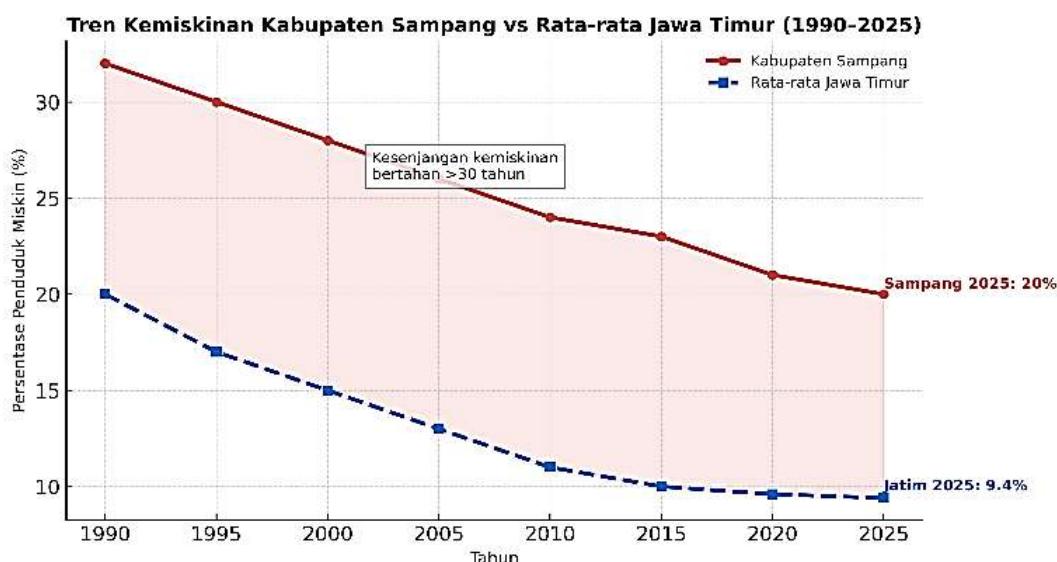
²⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020), hlm. 31–34.

²⁹ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018), hlm. 122–127.

³⁰ John W. Creswell, *Research Design*, hlm. 273–278.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Dinamika Kemiskinan Kronis di Kabupaten Sampang: Gambaran Tiga Dekade



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) – diolah peneliti

Selama tiga dekade terakhir (1990–2025), Kabupaten Sampang secara konsisten menempati posisi tertinggi tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Berdasarkan data BPS (2024), persentase penduduk miskin mencapai 20–24%, jauh di atas rata-rata provinsi (9,4%).³¹ Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Sampang bersifat kronis dan multidimensional, mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, infrastruktur, dan lapangan kerja produktif (Faradila, 2022; Muhammad Rizky, 2024).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat merasakan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kawasan pesisir dan utara (Sregeh, Kedungdung, Labuhan, Ketapang) tertinggal dari pusat kota Sampang, terutama dalam akses pendidikan, air bersih, dan infrastruktur ekonomi.

Bantuan sosial seperti BLT dan PKH dianggap membantu kebutuhan dasar, tetapi belum mampu mengubah struktur ekonomi local, sebagaimana ungkapan warga desa ketapang:

“Bantuan membantu makan, tapi tidak mengubah keadaan. Setelah bantuan habis, kami kembali seperti semula”.³²

Menurut Todaro dan Smith (2020), kemiskinan di negara berkembang bukan sekadar rendahnya pendapatan, melainkan keterbatasan kesempatan (*lack of capabilities*).³³ Kondisi Sampang memperlihatkan hal tersebut: potensi sektor pertanian

³¹ Badan Pusat Statistik (BPS), *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024* (Jakarta: BPS RI, 2024), hlm. 22–23.

³² Wawancara warga Desa Ketapang, 2025

³³ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (New York: Pearson Education, 2020), hlm. 235–238.

dan perikanan tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Akibatnya, kemiskinan terwariskan lintas generasi.³⁴

Secara keseluruhan, kemiskinan di Sampang menunjukkan karakteristik stagnasi struktural, di mana program bantuan bersifat konsumtif sementara transformasi ekonomi daerah tidak berjalan. Hal ini menandakan kegagalan kebijakan pembangunan yang belum menyentuh akar persoalan produktivitas masyarakat miskin.

Temuan ini mendukung teori *multidimensional poverty* dan *interlocking poverty trap* yang menyatakan bahwa kemiskinan memperkuat dirinya melalui berbagai mekanisme yang saling terkait.³⁵

2. Faktor Struktural: Ketimpangan Akses dan Keterbatasan Institusional

Faktor struktural menjadi penyebab utama kemiskinan kronis di Sampang. Hasil wawancara memperlihatkan empat masalah dominan: rendahnya pendidikan, infrastruktur tidak merata, lemahnya kelembagaan daerah, dan ketergantungan ekonomi pada sektor primer. Sebagaimana pada tabel berikut:

Kutipan Wawancara	Deskripsi Temuan	Sumber
<i>"Anak-anak di sini banyak berhenti sekolah setelah SD dan SMP, karena orang tua ingin mereka segera membantu bekerja dan ada juga yang menikah."</i>	Rendahnya pendidikan menghambat peningkatan kualitas SDM dan mobilitas sosial	Wawancara Kepala Sekolah, 2025
<i>"Kalau musim hujan, jalan ke kota rusak, hasil tani tidak bisa dijual."</i>	Infrastruktur buruk menghambat akses pemasaran hasil pertanian	Wawancara warga Sreseh, 2024
<i>"Program sering datang dari atas, tapi tidak sesuai kebutuhan nelayan di sini."</i>	Kebijakan top-down tidak berbasis kebutuhan local, kelembagaan lemah	Wawancara Perangkat Desa, 2024
<i>"Bantuan membantu makan, tapi tidak mengubah keadaan. Setelah bantuan habis, kami kembali seperti semula."</i>	Bansos bersifat konsumtif tidak menyentuh akar kemiskinan	Wawancara warga Ketapang, 2025

Tabel 1 : Hasil wawancara dari Faktor Struktural di Kabupaten Sampang

³⁴ Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 87–89.

³⁵ PWA Rejeki, "Multidimensional Poverty in Indonesia Period 2015–2018," *Proceedings of Economics and Business Conference* (2023), hlm. 33–36.

Sebagian besar masyarakat hanya menamatkan pendidikan hingga SD dan SMP, dan banyak anak tidak melanjutkan karena alasan ekonomi. sebagaimana ungkapan Kepala Sekolah. Kondisi ini menghambat mobilitas sosial dan memperkuat pola kerja serabutan berupah rendah. Todaro dan Smith (2020) menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor kunci peningkatan produktivitas dan pendapatan; tanpa itu, kemiskinan bersifat sistemik.³⁶

Selain pendidikan, infrastruktur yang timpang juga memperkuat ketidaksetaraan. Banyak jalan antar-desa rusak dan sulit dilalui saat hujan sebagaimana ungkapan salah satu warga sreseh. Minimnya infrastruktur dan akses pasar menunjukkan lemahnya perencanaan spasial daerah, sejalan dengan temuan Jalan dan Ravallion (2002) bahwa isolasi geografis memperdalam kesenjangan ekonomi.³⁷

Dari sisi kelembagaan, pemerintah desa masih sangat bergantung pada kebijakan top-down dari kabupaten atau provinsi. Kelemahan koordinasi dan rendahnya partisipasi publik mencerminkan institusi pembangunan yang tidak inklusif.³⁸ Di sisi lain, akses modal usaha masih dikuasai oleh tengkulak, menciptakan ketergantungan ekonomi dan *poverty trap*.³⁹

Dalam maqashid syariah, hal ini berarti gagal memenuhi *hifz al-'aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta).⁴⁰ Islam mewajibkan pemerintah memastikan akses terhadap sumber daya ekonomi secara adil dan merata.

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja” (QS. Al-Hasyr: 7)

Kelemahan struktural ini menjadi indikasi ketidakadilan distribusi dalam pandangan Islam.

3. Faktor Kultural: Budaya Fatalisme dan Reproduksi Kemiskinan

Dimensi kultural menjadi faktor penting dalam keberlanjutan kemiskinan kronis di Kabupaten Sampang. Wawancara lapangan menunjukkan adanya budaya pasrah (fatalisme) yang kuat, di mana sebagian masyarakat meyakini bahwa nasib ekonomi telah ditentukan oleh takdir sehingga usaha manusia dianggap terbatas. Hal tersebut dijelaskan pada tabel berikut:

Kutipan Wawancara	Deskripsi Temuan	Sumber
<i>“Mereka pikir rezeki sudah tetap tanpa perlu usaha keras</i>	Fatalisme menghambat motivasi berusaha dan inovasi ekonomi	Wawancara Tokoh Agama, 2025

³⁶ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (New York: Pearson Education, 2020), hlm. 237–238.

³⁷ Jyotsna Jalan dan Martin Ravallion, “Geographic Poverty Traps? A Micro Model of Consumption Growth in Rural China,” *Journal of Applied Econometrics*, Vol. 17 No. 4 (2002): 329–333.

³⁸ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), hlm. 34–36.

³⁹ Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 87–89.

⁴⁰ Kusnan, K. et al. (2022). *Maqashid al-Shariah in Economic Development*. Millah, 21(2), 585–589.

<i>kalaupun rejekinya secangkir, tak mungkin dapat sebakul."</i>		
<i>"Buat apa sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ke dapur."</i>	Rendahnya aspirasi pendidikan & ketimpangan peran gender	Wawancara Aparat Desa, 2024
<i>"Begini dapat hasil besar, langsung habis untuk acara selamatan, bukan disimpan."</i>	Pola konsumsi simbolik, bukan investasi produktif	Wawancara Perangkat Desa, 2025

Tabel 2 : Hasil wawancara dari Faktor Kultural di Kabupaten Sampang

Pandangan-pandangan yang dihasilkan dari hasil wawancara ini memperlihatkan kesenjangan antara ajaran agama yang menekankan kerja keras dan realitas sosial yang cenderung pasif. Masyarakat yang gagal panen, misalnya, lebih memilih “menerima nasib” daripada mencari solusi inovatif. Dalam konteks teori *Culture of Poverty*, Oscar Lewis (1966) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diwariskan melalui nilai dan kebiasaan sosial yang melemahkan inisiatif ekonomi serta menormalisasi ketergantungan.⁴¹

Fenomena ini tampak jelas di Sampang, di mana sikap nrimo (pasrah) dan ketergantungan pada bantuan sosial menunjukkan gejala reproduksi budaya kemiskinan.⁴² Namun dalam pandangan ekonomi Islam, sikap seperti itu merupakan pemahaman keliru terhadap konsep tawakal, karena Islam menuntut usaha aktif (ikhtiar) sebelum menyerahkan hasil kepada Allah Swt.⁴³ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Sebaik-baik makanan adalah hasil usaha tangan sendiri.” (*HR. Tirmidzi, No. 1358*).⁴⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa kerja keras dan produktivitas ekonomi merupakan nilai moral yang dijunjung tinggi dalam Islam, sekaligus menjadi penegasan bahwa kemiskinan tidak boleh diterima sebagai takdir tanpa upaya perbaikan.⁴⁵

Selain hal itu, hasil wawancara juga menunjukkan rendahnya aspirasi pendidikan dan partisipasi perempuan dalam ekonomi. Sebagian keluarga masih berpandangan

⁴¹ Oscar Lewis, *La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty – San Juan and New York* (New York: Random House, 1966), hlm. xvii–xx.

⁴² Jonathan Rigg, *Forgotten People: Poverty, Risk and Social Security in Indonesia – The Case of the Madurese* (Singapore: NUS Press, 2018), hlm. 83–85.

⁴³ F. Syahriani, “Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 3 No. 2 (2023): 44–46.

⁴⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab al-Buyu‘, No. 1358 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), hlm. 102–103.

⁴⁵ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam* (Lahore: Islamic Publications, 1988), hlm. 58–60.

bahwa perempuan cukup bersekolah hingga SMA dan fokus pada peran domestik. Kondisi ini memperkuat argumen Todaro dan Smith (2020) bahwa rendahnya kesadaran pendidikan dan partisipasi perempuan dalam pasar kerja menjadi faktor non-ekonomi yang memperpanjang kemiskinan.⁴⁶

Masyarakat pesisir juga menunjukkan pola konsumsi yang cenderung tidak produktif. Ketika hasil tangkapan melimpah, sebagian besar penghasilan dihabiskan untuk kebutuhan sosial seperti hajatan, bukan tabungan atau investasi. Fenomena ini mencerminkan *budaya konsumsi simbolik* yang mengutamakan status sosial daripada akumulasi ekonomi.⁴⁷ Meskipun nilai gotong royong dan solidaritas masih kuat, orientasi konsumtif menghambat akumulasi modal keluarga. Nilai-nilai agama seperti amanah dan tanggung jawab ekonomi pun belum sepenuhnya terinternalisasi, sebagaimana ditegaskan oleh tokoh agama bahwa zakat dan sedekah masih bersifat seremonial, belum menjadi sarana pemberdayaan ekonomi produktif.⁴⁸

Dengan demikian, faktor kultural di Sampang dapat disarikan menjadi tiga aspek utama: (1) fatalisme religius yang mengurangi dorongan berusaha, (2) ketimpangan gender dan pendidikan, serta (3) pola konsumsi tidak produktif. Ketiga aspek ini membentuk *reproduksi sosial kemiskinan*, di mana nilai-nilai sosial justru berperan mempertahankan status ekonomi rendah. Lewis (1966) menegaskan bahwa perubahan budaya hanya mungkin terjadi jika ada intervensi struktural melalui pendidikan dan partisipasi sosial yang inklusif.⁴⁹

4. Faktor Geografis: Keterisolasiwilayah dan Kesenjangan Infrastruktur

Secara geografis, Sampang menghadapi tantangan yang kompleks akibat keterpenciran wilayah, minimnya konektivitas, dan kondisi alam yang ekstrem. hal tersebut telah dipaparkan di dalam tabel wawancara berikut:

Kutipan Wawancara	Deskripsi Temuan	Sumber
<i>"Kalau hujan, jalan licin dan tergenang. Kadang harus pakai perahu kecil untuk menyeberang."</i>	Aksesibilitas rendah, biaya logistik tinggi, menambah beban kemiskinan	Wawancara Perangkat Desa Labuhan, 2025
<i>"Kadang hasil ikan dijual murah ke tengkulak, karena</i>	Keterisolasiwilayah memperkuat	Wawancara Nelayan Labuhan, 2025

⁴⁶ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (New York: Pearson Education, 2020), hlm. 284–285.

⁴⁷ Jonathan Rigg, *Forgotten People: Poverty, Risk and Social Security in Indonesia – The Case of the Madurese* (Singapore: NUS Press, 2018), hlm. 79–81.

⁴⁸ Muslihun, "Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1 (2023): 77–79.

⁴⁹ Oscar Lewis, *La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty – San Juan and New York* (New York: Random House, 1966), hlm. xvii–xix.

<i>tidak ada cara cepat ke pasar kecamatan."</i>	ketergantungan pada tengkulak	
<i>"Kami sudah terbiasa begini. Susah mau berubah kalau kerja lain tidak ada."</i>	Persepsi stagnan karena keterbatasan pilihan pekerjaan	Wawancara warga Ketapang Laok, 2025

Tabel 3 : Hasil wawancara dari Faktor Geografis di Kabupaten Sampang

Wawancara di Desa Labuhan menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan waktu hampir satu jam untuk mencapai pusat kota Sampang karena akses jalan yang rusak dan sebagian wilayah harus melewati daerah Bangkalan. Letak geografis ini menciptakan biaya ekonomi tinggi untuk distribusi barang dan akses terhadap layanan publik. Jalan yang rusak, sinyal internet yang tidak stabil, dan listrik yang sering padam memperburuk aktivitas ekonomi, terutama di sektor perikanan dan pertanian. Nelayan mengaku terpaksa menjual hasil tangkapan kepada tengkulak dengan harga rendah karena kesulitan mengakses pasar besar.⁵⁰

Fenomena ini menggambarkan apa yang disebut Jyotsna Jalan dan Martin Ravallion (2002) sebagai *geographic poverty trap*, yaitu perangkap kemiskinan yang disebabkan oleh keterpenciran lokasi dan rendahnya konektivitas antarwilayah, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat akumulasi modal produktif.⁵¹ Dalam konteks Sampang, keterisolasi wilayah pesisir dan utara memperkuat ketimpangan spasial antara desa dan kota, sehingga pembangunan ekonomi cenderung terpusat di wilayah inti kabupaten.⁵²

Selain itu, kondisi geografis pesisir menimbulkan kerentanan ekologis. Warga Desa Labuhan melaporkan bahwa pada musim penghujan sering terjadi rob dan angin kencang, sementara pada musim kemarau mereka mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih. Ketidakstabilan iklim ini menyebabkan pendapatan nelayan dan petani tambak menjadi sangat fluktuatif, memperbesar risiko kemiskinan musiman.⁵³

Kondisi geografis juga berdampak pada akses pendidikan dan kesehatan. Anak-anak di daerah pesisir sering terlambat sekolah atau absen saat jalan tergenang air, dan warga yang sakit harus menempuh jarak 7–8 km ke puskesmas kecamatan. Masalah ini memperkuat hubungan antara geografi dan kemiskinan, sebagaimana dijelaskan oleh Amartya Sen (1999) bahwa kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga

⁵⁰ Data wawancara lapangan, Desa Labuhan, 2025.

⁵¹ Jyotsna Jalan dan Martin Ravallion, "Geographic Poverty Traps? A Micro Model of Consumption Growth in Rural China," *Journal of Applied Econometrics*, Vol. 17 No. 4 (2002): 329–333.

⁵² W.S. Nugroho, *Geographic Poverty Traps in Rural Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Repository, 2021), hlm. 44–46.

⁵³ Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Daerah Kabupaten Sampang 2024* (Jakarta: BPS RI, 2024), hlm. 65–68.

keterbatasan kebebasan dalam mengakses peluang dasar kehidupan (*capability deprivation*).⁵⁴

Dengan demikian, kemiskinan geografis di Sampang dapat disarikan menjadi tiga hal:

1. Jarak dan infrastruktur yang buruk,
2. Ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam yang rapuh, dan
3. Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Faktor geografis ini berinteraksi dengan faktor struktural dan kultural, menciptakan perangkap kemiskinan spasial (spatial poverty trap) yang sulit diputus tanpa adanya intervensi pembangunan wilayah terpadu dan berkeadilan.⁵⁵

Dalam pandangan Islam, ketidakmerataan wilayah dan pengabaian terhadap daerah tertinggal merupakan pelanggaran moral dalam distribusi kerja dan kekayaan. Islam memandang bahwa keadilan pembangunan harus bersifat menyeluruh, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hasyr (59) 7:

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”⁵⁶

Ayat ini menegaskan bahwa distribusi sumber daya dan hasil pembangunan yang timpang secara spasial bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan ekonomi Islam.⁵⁷

5. Interaksi Antarfaktor: Perangkap Kemiskinan Multidimensional

Hasil penelitian menunjukkan kemiskinan kronis di Sampang tidak disebabkan oleh satu aspek tunggal, tetapi merupakan jebakan kemiskinan multidimensi yang saling menguatkan. Konsep ini sesuai teori *interlocking poverty trap* yang menyatakan kemiskinan bertahan karena hubungan kausal antar faktor dalam pola siklus berulang.⁵⁸ Berikut adalah penjelasan tabel yang telah disusun sebelumnya:

Dimensi	Temuan Lapangan	Bukti Teori	Perspektif Ekonomi Islam
Struktural	Pendidikan rendah, akses buruk	<i>Structural inequality</i>	<i>hifz al-'aql, hifz al-mal</i> belum terpenuhi
Kultural	Fatalisme, konsumsi simbolik	<i>Culture of poverty</i>	Etos kerja Islami belum mengakar
Geografis	Isolasi, biaya tinggi	<i>Geographic poverty trap</i>	Distribusi akses belum adil

⁵⁴ Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 87–89.

⁵⁵ Christopher B. Barrett dan Brent M. Swallow, “Dynamic Poverty Traps and Rural Livelihoods,” *World Development*, Vol. 34 No. 1 (2006): 20–23.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Hasyr [59]:7.

⁵⁷ M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008), hlm. 112–115.

⁵⁸ Todaro, M. & Smith, S. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson. hlm. 130–138.

Tabel 4 : *Interaksi Antarfaktor, Perangkap Kemiskinan Multidimensional*

Dari tabel diatas bisa kita lihat, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan kronis di Kabupaten Sampang merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, dan geografis yang saling menguatkan dalam sebuah *interlocking poverty trap*. Pertama, dari sisi struktural, keterbatasan akses terhadap pendidikan yang memadai serta infrastruktur ekonomi yang kurang berkembang telah menghasilkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya akses pasar bagi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan rendahnya produktivitas serta minimnya kemampuan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Temuan ini mendukung pandangan Todaro & Smith bahwa kemiskinan seringkali dipertahankan oleh ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dasar dalam pembangunan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini menunjukkan bahwa dua aspek penting *maqashid syariah* belum terpenuhi, yaitu *hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal melalui pendidikan) dan *hifz al-mal* (perlindungan dan pengembangan harta).⁵⁹

Kedua, kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor kultural yang tertanam dalam kebiasaan dan cara pandang masyarakat. Beberapa warga menunjukkan sikap fatalistik terhadap nasib ekonomi mereka, merasa bahwa perubahan sulit terjadi meskipun telah berusaha keras. Selain itu, sebagian besar pendapatan justru dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi yang bersifat simbolik dan seremonial, sehingga tidak membentuk akumulasi aset produktif. Pola ini sesuai dengan teori *culture of poverty* yang dikemukakan Lewis, bahwa nilai-nilai budaya dapat berkontribusi pada keberlangsungan kemiskinan.⁶⁰ Namun demikian, dari perspektif Islam, budaya fatalistik ini tidak sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan etos kerja, produktivitas, dan kewajiban seseorang untuk berusaha memperbaiki kehidupannya.

Ketiga, faktor geografis juga memainkan peran signifikan. Beberapa wilayah di Sampang berada pada lokasi pesisir terpencil dengan akses transportasi yang minim, mengakibatkan biaya logistik yang tinggi dan kualitas pemasaran hasil produksi — seperti garam atau hasil laut — tergantung pada tengkulak. Temuan ini sejalan dengan teori *geographic poverty trap* yang menjelaskan bahwa lokasi dapat menjadi sumber ketidaksetaraan ekonomi yang sistemik.⁶¹ Dalam kacamata ekonomi Islam, keterbatasan akses yang mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi peluang ekonomi bertentangan dengan prinsip *maslahah amma* (kemaslahatan umum) dan amanah pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan.

Dari sintesis ketiga faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat miskin di Sampang menghadapi kondisi tidak mampu, tidak tahu, dan tidak berdaya untuk keluar

⁵⁹ Kusnan, K., Osman, M. D., & Khalilurrahman. (2022). *Maqashid al-Shariah in Economic Development, Millah*, 21(2), 585–589.

⁶⁰ Lewis, O. (1966). *The Culture of Poverty*. *Scientific American*, 215(4), hlm. 20–22.

⁶¹ Jalan, J., & Ravallion, M. (2002). *Geographic Poverty Traps*. *Journal of Applied Econometrics*, 17(4), 330–333.

dari kemiskinan yang telah menetap lintas generasi. Kemiskinan bukan hanya masalah pendapatan, tetapi kegagalan struktural, nilai sosial yang menghambat mobilitas, dan hambatan geografis yang saling memperkuat. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat holistik, mengintervensi ketiga faktor secara serentak untuk dapat memutus siklus kemiskinan kronis dan mengarah pada pembangunan yang berkeadilan sesuai prinsip Ekonomi Islam.

6. Implikasi Syariah: Strategi Pemutusan Jebakan Kemiskinan

Upaya pemutusan *interlocking poverty trap* di Kabupaten Sampang membutuhkan pendekatan terpadu yang menggabungkan intervensi struktural dan nilai-nilai ekonomi Islam. Intervensi yang hanya bersifat karitatif terbukti tidak cukup mengatasi masalah kemiskinan kronis yang bersifat multidimensi dan diwariskan lintas generasi. Oleh karena itu, kebijakan yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan harus diletakkan dalam kerangka *maqashid syariah* yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pemerataan akses, peningkatan martabat manusia, dan pemenuhan kebutuhan dasar demi mencapai *falah* (kesejahteraan dunia, akhirat).⁶²

Pertama, penguatan institusi ekonomi syariah menjadi elemen strategis untuk mengatasi hambatan struktural dalam permodalan dan akses ekonomi masyarakat miskin. Lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan lembaga zakat produktif dapat menjadi sumber pembiayaan yang adil dan lebih inklusif bagi pelaku UMKM dan nelayan.⁶³ Melalui skema pembiayaan berbasis bagi hasil serta program pembinaan usaha, masyarakat tidak lagi terikat pada praktik tengkulak yang eksploratif. Di sisi lain, integrasi wakaf produktif dapat menciptakan aset ekonomi bersama sehingga kepemilikan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr: 7 yang menolak terjadinya akumulasi kekayaan hanya pada segelintir orang.

Kedua, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional, penyuluhan literasi keuangan syariah, serta internalisasi nilai etos kerja dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya budaya pasrah (*fatalism*) dan pola konsumsi yang kurang produktif. Pemahaman ini bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan usaha mandiri sebagai bentuk ibadah.⁶⁴ Transformasi nilai sosial menjadi penting untuk menumbuhkan keberanian mengambil risiko ekonomi, kreativitas usaha, serta keinginan kuat untuk keluar dari kemiskinan. Dalam perspektif maqashid syariah, upaya ini merupakan bentuk perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) dan peningkatan potensi harta (*hifz al-mal*) secara bersamaan.

Ketiga, optimalisasi pembangunan wilayah dan infrastruktur ekonomi harus dilakukan untuk mengurangi hambatan geografis. Banyak daerah pesisir dan pedesaan di Sampang terisolasi sehingga biaya logistik tinggi, harga jual hasil produksi rendah, dan akses pasar terbatas. Kondisi ini menempatkan masyarakat pada posisi tawar yang lemah

⁶² Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: IIIT, hlm. 45–49.

⁶³ Rokhman, W. (2013). *The Effect of Islamic Microfinance on Poverty Alleviation*. ERJEB, 11(2), 23–27.

⁶⁴ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. Hadits No. 2072.

dan rentan eksploitasi harga. Peningkatan jalan produksi, cold storage pesisir, serta sarana digital marketing desa akan memperluas akses ekonomi masyarakat pada rantai nilai yang lebih menguntungkan.⁶⁵ Dalam ajaran Islam, pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan fasilitas publik untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan serta memenuhi kebutuhan masyarakat luas (*maslahah amma*).

Keempat, pemberdayaan pesantren dan perempuan perlu menjadi prioritas sebagai penggerak perubahan sosial. Pesantren yang merupakan lembaga paling dipercaya oleh masyarakat Madura dapat menjadi pusat edukasi ekonomi syariah dan inkubasi UMKM berbasis komunitas. Begitu pula perempuan, yang selama ini memiliki peran penting dalam ekonomi rumah tangga namun belum diberdayakan secara optimal. Melibatkan kedua kelompok ini diharapkan mampu mempercepat perubahan perilaku ekonomi, meningkatkan kepercayaan diri masyarakat, serta memperluas ruang partisipasi dalam pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, pemutusan rantai kemiskinan kronis di Sampang hanya dapat dicapai melalui kebijakan terpadu yang menyasar kompetensi, kesempatan, dan keberdayaan masyarakat secara bersamaan. Pendekatan berbasis nilai Islam tidak hanya memperbaiki ekonomi material, tetapi juga membangun mentalitas, struktur sosial, dan tata kelola ekonomi yang berkelanjutan. Upaya ini menjadi langkah nyata menuju terwujudnya pembangunan berkeadilan yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

E. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemiskinan kronis di Kabupaten Sampang merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor struktural, kultural, dan geografis yang saling memperkuat, membentuk sebuah interlocking poverty trap atau perangkap kemiskinan multidimensi. Dari sisi struktural, kemiskinan dipertahankan oleh keterbatasan akses pendidikan, lemahnya infrastruktur ekonomi, dan kebijakan pembangunan yang belum inklusif. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menghambat produktivitas, sementara ketergantungan pada sektor primer tanpa diversifikasi ekonomi memperlemah daya saing daerah.

Dari sisi kultural, muncul budaya fatalistik (pasrah pada takdir), pola konsumsi simbolik, serta rendahnya aspirasi pendidikan, terutama bagi perempuan. Nilai-nilai sosial tersebut memperkuat siklus kemiskinan karena menghambat inovasi dan partisipasi ekonomi masyarakat. Dari sisi geografis, keterpencilan wilayah pesisir dan minimnya infrastruktur dasar menyebabkan ketimpangan spasial yang signifikan. Akses pasar, pendidikan, dan kesehatan yang sulit dijangkau menambah beban biaya ekonomi dan memperkuat ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak maupun bantuan sosial.

⁶⁵ Todaro, M. & Smith, S. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson, hlm. 135–140

Interaksi antarfaktor tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Sampang bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistemik dalam pemenuhan prinsip keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini menunjukkan belum terpenuhinya *maqāṣid syariah*, khususnya *hifz al-‘aql* (pemeliharaan akal), *hifz al-māl* (pemeliharaan harta), dan tujuan akhir falah (kesejahteraan dunia–akhirat).

Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sampang harus dilakukan secara holistik dan berbasis nilai Islam, meliputi:

1. Penguatan lembaga keuangan mikro syariah (BMT, zakat, dan wakaf produktif) untuk memperluas akses permodalan dan mengurangi ketergantungan pada tengkulak
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasional, literasi keuangan syariah, dan internalisasi etos kerja Islami
3. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah untuk memperkecil kesenjangan geografis, serta
4. Pemberdayaan pesantren dan perempuan sebagai motor sosial dalam transformasi ekonomi masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan jebakan kemiskinan multidimensi di Sampang dapat diputus secara berkelanjutan, dan pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan sebagaimana diamanatkan dalam ekonomi Islam.

REFERENSI

- Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi, Kitab al-Buyu'*, No. 1358 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998).
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).
- Amartya Sen, *Development as Freedom* (Oxford: Oxford University Press, 1999).
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024* (Jakarta: BPS RI, 2024)
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Daerah Kabupaten Sampang 2024* (Jakarta: BPS RI, 2024)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: IIIT.
- Christopher B. Barrett dan Brent M. Swallow, "Dynamic Poverty Traps and Rural Livelihoods," *World Development* 34, no. 1 (2006).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-Hasyr (59) 7.
- Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

- Dwirani Puspa Artha and Teguh Dartanto, *'The Multidimensional Approach to Poverty Measurement in Indonesia: Measurements, Determinants and Its Policy Implications'*, 2020.
- F. Khaleel, "Redefining Poverty and Its Measurement: An Islamic Political Economy Approach," Grieb: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 4, no. 1 (2021).
- F. Syahriani, "Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics," Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol. 3 No. 2 (2023).
- Habib Ahmed, *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2004).
- Jalan, J., & Ravallion, M. *Geographic Poverty Traps*. *Journal of Applied Econometrics*, 17 (2002).
- Jeffrey D. Sachs dan John Luke Gallup, "Geography and Economic Development," NBER Working Paper Series No. 6849 (1998).
- Jimea Jurnal and others, 'PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TERHADAP ANGKA MORBIDITAS KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR JIMEA, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)', 9.1 (2025).
- John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).
- Jonathan Rigg, *Forgotten People: Poverty, Risk and Social Security in Indonesia – The Case of the Madurese* (Singapore: NUS Press, 2018).
- Jyotsna Jalan dan Martin Ravallion, "Geographic Poverty Traps? A Micro Model of Consumption Growth in Rural China," *Journal of Applied Econometrics* 17, no. 4 (2002).
- Kusnan, K., Osman, M. D., & Khalilurrahman. *Maqashid al-Shariah in Economic Development*, Millah, 21 (2022).
- Lewis, O. *The Culture of Poverty*. Scientific American, 215 (1966).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).
- M. Asutay, "Islamic Moral Economy and the Financialisation Process," *Islamic Economic Studies* 19, no. 1 (2011).
- M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2008).
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020).
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (New York: Pearson Education, 2020).
- Michael R. Carter dan Christopher B. Barrett, "The Economics of Poverty Traps and Persistent Poverty: An Asset-Based Approach," *Journal of Development Studies* 42, no. 2 (2006).
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Shahih Bukhari. Hadits No. 2072.

- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *The Economic Enterprise in Islam* (Lahore: Islamic Publications, 1988).
- Muhammad Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* (Jeddah: IRTI-IDB, 2008).
- Munich Personal, Repec Archive, and De Silva, 'Beyond the Headcount: Examining the Dynamics and Patterns of Multidimensional Poverty in Indonesia.', 2014.
- Muslihun, "Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia pada Zakat Produktif dan Wakaf Produktif," Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 1 (2023).
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.), *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, 5th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).
- Oscar Lewis, *La Vida: A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty*, San Juan and New York (New York: Random House, 1966).
- PWA Rejeki, "Multidimensional Poverty in Indonesia Period 2015–2018," Proceedings of Economics and Business Conference (2023).
- Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).
- Rokhman, W. *The Effect of Islamic Microfinance on Poverty Alleviation*. ERJEB, 11 (2013).
- S. Maulida, "Maqasid Shariah Index: A Literature Review," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* 8, no. 2 (2023).
- Sabina Alkire dan Maria Emma Santos, "Multidimensional Poverty Index," OPHI Working Paper, Oxford University, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022).
- Todaro, M. & Smith, S. *Economic Development* (13th ed.). Pearson, (2020).
- W.S. Nugroho, *Geographic Poverty Traps in Rural Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Repository, 2021).